

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, Hukum Administrasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, Prenada Media Group, Jakarta, 2014, hlm 1.
- Andi Hamzah. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Balai Pustaka, Jakarta, 2014, hal. 22
- Andreas Budiharjo, Organisasi: Menuju Pencapaian Kinerja Optimum, Prasetya Mulya Publishing, Jakarta, 2016.
- Anna Erliyana dalam disertasinya, Analisi Keputusan Presiden Republik Indonesia Kurun Waktu 1977-1998, Tinjauan Asas Larangan Melampaui Wewenang (2004).
- Barda Nawawi Arief dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 2015, hal. 56.
- Bryan A. Garner at al. (ed.), Black Law Dictionary, Seventh Edition, St. Paul: West Group, 2016.
- Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus besar bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, hal. 62.
- Hernold Ferry Makawimbang, Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi, Suatu Pendekatan Hukum Progresif, Thafa Medai, Yogyakarta, 2014.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- Maringka, Jan S. Reformasi Kejaksaan dalam Sistem hukum nasional Sinar Grafika, Jakarta 2019
- Nur Basuki Winanrno, Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi, laksbang mediatama, Yogyakarta, 2016, hal. 65.
- Nurjana, Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi. Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hal. 14
- P.A.F. Lamintang Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung, 2016.

Peraturan Perundang-undangan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Perpres Nomor 17 Tahun 2011 tentang kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang Kopolnas

Poewadarminta W.J.S. Kamus Besar Umum Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta, 2016, hal. 34

Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, Hukum Tata Pemerintahan, 2020

Ridwan H.R. hukum administrasi negara, PT Raja Grafindo Persada, jakarta, 2015, hal.71

Setda.tegalkab.go.id, KPK Ungkap Lima Modus Korupsi Kepala Daerah, September 2021.

Syed Husein Alat, Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, LP3ES, Jakarta, 2015, hal. 12.

Undang-undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Pertanggung Jawaban Keuangan Negara.

Undang-undang No.17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara.

Undang-undang Tindak Pidana Korupsi No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan

Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang

No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi